

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10222100)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10222100>

Penerapan E-Government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Aplikasi SIMANJA

Rendy Ramadhan^{1*}, Pimpi Fardianti², Aprilia Shafinatuz Zahwa³, Ivan Darmawan⁴
^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: rendy20004@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara. Metode Penelitian ini menggunakan Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara masih diperlukan adanya sosialisasi secara kontinyu dan konsisten, diperlukan anggaran yang mencukupi dalam melakukan sosialisasi, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mempunyai kesiapan optimal dalam menjalankan aplikasi SIMANJA, dan keberadaan aplikasi SIMANJA sudah dapat dirasakan secara optimal oleh pemerintah dalam manajemen aset daerah.

Kata kunci: *E-Government, Manajemen Aset, Kabupaten Jepara.*

Article Info

Received date: 12 November 2023

Revised date: 20 November 2023

Accepted date: 27 November 2023

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya lokal sebaik mungkin yang dimilikinya secara optimal.

Pengelolaan aset yang didasarkan pada konsep manajemen yang efektif dan efisien sangat bermanfaat dan dapat mendukung pembangunan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Pratama (2016), pengelolaan aset yang kompeten dan kontemporer dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan mengedepankan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu cara untuk menunjukkan penerapan sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, edukatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui penggunaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Suwanda, 2015).

Aset tetap memiliki peran penting dalam membantu instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena aset tetap dapat menjadi elemen pendukung dalam menyelesaikan suatu tugas yang dapat meningkatkan produktivitas instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan struktur manajemen yang kuat dalam menunjang hal tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah dituntut untuk terus melakukan berinovasi untuk melaksanakan tujuan rencana agar cepat, berkualitas, transparansi, dan akuntabel. Pada era revolusi Industri 4.0 ini telah melahirkan bentuk teknologi-teknologi yang dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pemerintah tak terkecuali dalam manajemen aset. Manajemen aset dengan menggunakan teknologi merupakan sebuah tuntutan sehingga

pemerintah harus mengedepankan teknologi yang menjadi bahan pendukung dalam manajemen aset dengan rapi. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) dapat memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan sebagai tujuan untuk mewujudkan *good governance*.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik didorong oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Menurut Bank Dunia (2004), e-Government mengacu pada penerapan teknologi informasi oleh organisasi yang mampu memahami interaksi antara masyarakat, sektor swasta, dan institusi pemerintah. Oleh karena itu, karena e-Government menyederhanakan prosedur pemerintah, maka efisiensi dalam prakteknya menjadi tujuannya (Setiawati, 2009).

Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi salah satu pemerintah daerah yang telah mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi (*e-Government*) manajemen aset daerahnya. Salah satu bentuk keluaran *e-Government* dari Pemkab Jepara adalah SIMANJA. SIMANJA merupakan aplikasi yang menggunakan *desktop base system*, aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan barang milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang relevan dan andal, kepada pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat atau pihak yang berkepentingan.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi dasar hukum yang melandasi pembuatan dan pelaksanaan aplikasi SIMANJA.

Aplikasi SIMANJA diharapkan dapat menghasilkan informasi yang relevan dan andal, sebagai bentuk untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara terkait penatausahaan barang milik daerah yang belum tertata secara baik sehingga belum dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Kesuksesan dalam implementasi *e-Government* dapat dilihat dari tiga elemen yakni, *support* (dukungan), *capacity* (kemampuan), dan *value* (nilai), Indrajit (dalam Sadikin 2011). Ketiga elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Support* (Dukungan)

Pengembangan e-Government harus menjadi tujuan para pemimpin. Selain harus cerdas, para pemimpin adalah motivator yang sangat baik selama fase implementasi. Pengembangan e-Government tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya kemauan politik. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang paling tinggi harus terlebih dahulu memberikan dukungan untuk implementasi inisiatif e-Government yang efisien.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan merupakan keadaan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-Government*. Kemampuan tersebut seperti, ketersediaannya sumber daya manusia, sumber daya modal, serta ketersediaannya infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

3. *Value* (Nilai)

Jika tidak ada yang diuntungkan dari penerapan e-Government, maka tidak ada gunanya; dalam hal ini, menentukan apakah e-Government menguntungkan siapa pun atau tidak. Oleh karena itu, untuk benar-benar memberikan manfaat yang besar, pemerintah harus berhati-hati dan memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas pembangunan mana yang harus didahulukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang dikaji adalah diantaranya menggunakan tiga elemen konsep keberhasilan *e-government* menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* diantaranya *Support* yaitu sejauh mana dukungan pemerintah dalam penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMANJA, *Capacity* yaitu bagaimana kapasitas, kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMANJA, dan *Value* yaitu kebermanfaatannya yang dirasakan dalam penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMANJA (Indrajit, 2016). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jepara. Informan dalam penelitian ini diantaranya Sub. Koordinator Pencatatan Aset dan Mutasi Aset dan Penilai Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu Heru Sutrisno, S.E., M.M. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah dalam kajian penerapan *e-government* melalui aplikasi SIMANJA di Kabupaten Jepara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara, mempunyai fungsi: a. Menyusun kebijakan teknis. b. Menyelenggarakan pelayanan umum dan pemerintahan. c. Memberi petunjuk dan melaksanakan tugasnya. d. Melaksanakan pengelolaan dinas. e. Menyelenggarakan administrasi dinas. f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melakukan pencatatan aset daerah seiring dengan berjalannya zaman, penyelenggaraan pemerintahan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mempermudah melakukan pencatatan aset daerah secara praktis, Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan inovasi dengan salah satunya membuat aplikasi SIMANJA.

SIMANJA adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka penatausahaan aset daerah atau barang daerah dalam rangka memudahkan pencatatan pendataan barang milik daerah. SIMANJA adalah aplikasi berbasis desktop masing-masing yang bisa login di perangkat laptop atau komputer setiap OPD dan SKPD. Aplikasi SIMANJA hadir pada tahun 2018. Setiap OPD dan SKPD memiliki username dan password sendiri dan tidak bisa dibuka oleh pihak lain kecuali admin pusat yaitu BPKAD. Yang tercantum dalam SIMANJA meliputi dari pencatatan aset tetap yg intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Aset tetap meliputi tanah, peralatan mesin, bangunan, jalan, jaringan irigasi. Aset tetap lainnya buku referensi arsip dari perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Di dalamnya juga menghitung penyusutan aset dan laporan penyusunan neraca yg dibutuhkan oleh penyusunan neraca akuntansi daerah. Aplikasi SIMANJA dibuat dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga. Memesan aplikasi yang telah diinginkan, pihak ketiga membangun apa yang telah dipesan oleh BPKAD.

Dukungan pemerintah adalah salah satu hal yang berpengaruh yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menerapkan sebuah inovasi untuk mewujudkan pengembangan *e-government*. Tanpa dukungan pemerintah, sebuah konsep *e-government* mustahil dapat berjalan dengan baik. Dukungan yang dimaksud bisa berupa kebijakan dan peraturan yang mendukung terlaksananya *e-government*, disosialisasikannya konsep *e-government* secara

menyeluruh dan terus-menerus. Pada tingkat pusat, ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selaras dengan lahirnya kebijakan pemerintah pusat, terdapat kebijakan lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen aset daerah yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah. Setiap ada perubahan regulasi, BPKAD juga menyesuaikan. Pemerintah Kabupaten Jepara sangat baik dalam merespon adanya SIMANJA. Salah satunya memberikan anggaran mulai dari pembangunan pertama sampai pengembangan, selanjutnya saat ini masih ada anggaran yang diberikan kepada BPKAD dalam rangka penertiban aset SIMANJA.

Selanjutnya, dukungan berupa sosialisasi dilaksanakan guna memperkenalkan bagaimana konsep pengembang e-government, diharapkan dengan adanya sosialisasi kepada pengguna SIMANJA yaitu Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sosialisasi bertujuan agar kalangan pemerintah dapat memperoleh informasi serta memahami penggunaan e-government. Pihak yang melakukan sosialisasi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Sosialisasi dimulai pada internal terlebih dahulu yaitu bidang akuntansi dan aset. Setelah itu sosialisasi dilakukan ke pengguna yaitu pengurus barang di setiap OPD. Ada 576 OPD meliputi dinas, badan, kecamatan, SMP, Puskesmas, Satkor, SD, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan sosialisasi dilakukan pembinaan secara pemakaian seperti apa, memasukkan username, password, bagaimana cara input, hasilnya seperti apa. Untuk ke masyarakat bisa melihat data yang sudah diolah menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu isinya neraca daerah seperti aset barang milik daerah Jepara saat ini yang nilainya 7 Triliun.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Sumber daya manusia yang ada di OPD/SKPD/Dinas/Badan pada awal pengembangan masih belum memadai, pengurus aset atau barang adalah orang yang kurang kompeten atau tidak terpakai pada dinas masing-masing. Tetapi dengan adanya berjalannya waktu adanya pemanfaatan teknologi sudah mulai membaik hampir 90% sumber daya manusia sudah bisa menggunakan dengan baik. Kekurangan anggaran dalam sosialisasi yang seharusnya dilakukan 3-4 hari sehingga diringkas menjadi satu hari karena keterbatasan anggaran.

Penerapan aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara) ini mengeluarkan anggaran pertama untuk pembuatan aplikasi sebesar 90 juta rupiah yang berasal dari dana APBD. Selanjutnya, mengeluarkan anggaran pemeliharaan untuk melengkapi fitur-fitur yang belum ada sebesar 80 juta rupiah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Heru sebagai Koordinator tim pengelola aplikasi SIMANJA menjelaskan sebenarnya anggaran tersebut belum memadai untuk menunjang kelangsungan aplikasi SIMANJA, setiap tahunnya pihak pelaksana aplikasi SIMANJA selalu berusaha untuk meningkatkan pengajuan permohonan anggaran melalui RENJA (Rencana Kerja), namun dari hasil evaluasi APBD belum bisa merealisasikan permohonan peningkatan anggaran tersebut karena harus berbagi dengan program yang lain serta menyesuaikan juga dengan kemampuan APBD tersebut. Hal tersebut tidak membuat para pelaksana aplikasi SIMANJA untuk mundur melainkan terus berusaha untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Salah satu contoh dalam pengoptimalan anggaran para pelaksana melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMANJA secara online menggunakan platform zoom untuk menekan anggaran konsumsi serta transportasi. Hanya saja dampak dari sosialisasi secara online ini hasilnya tidak maksimal, karena sering terjadi kendala teknis seperti jaringan yang tidak memadai dan kurang terkontrolnya para *audience* untuk memperhatikan saat sosialisasi sedang berlangsung.

Selain anggaran, Sumber Daya Manusia juga aspek krusial dalam pengelolaan aplikasi SIMANJA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Heru sebagai Koordinator tim pengelola aplikasi SIMANJA mengatakan bahwa SDM pada pengelolaan aplikasi SIMANJA sudah siap namun tidak 100% dikarenakan para pengelola terbebani dengan kegiatan lain yang lebih penting yang harus dikerjakan. Misalnya, pengelola yang memegang juga bidang pariwisata harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan mengenai pariwisata. Tim pengelola aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara) dikelola oleh 9 orang pengelola dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara

No	Kedudukan dalam TIM	Jabatan pada Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Kepala BPKAD Kab. Jepara	Ronji, S.E., M.M
2.	Ketua	Kabid Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara	Karunititi, S.E., M.M
3.	Koordinator	1. Penilai Pemerintah Ahli Madya 2. Staf Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara	1) Heru Sutrisno, S.E., M.M 2) Daru Ratna Kartikasari, S.Kom., M.M
4.	Anggota Administrasi	Staf Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara	1)Embar Wika Ristiani, S.E 2)Hamzah Ratnasari, S.E. 3)Retno Sulistiyaningrum, S.T.
5.	Maintenance Engginering	Staf Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kab. Jepara	1)Teguh Dini Saputra, S.Kom. 2)Tegar Gusmanico, S.T

Rata-rata tim pengelola Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara (SIMANJA) tersebut memiliki basic di bidang ekonomi, kimia dan sistem informasi. Namun dalam penentuan pemilihan pengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara (SIMANJA) tidak ada kriteria maupun kompetensi tertentu yang harus dimiliki. Walaupun seharusnya pemilihan tim pengelola aplikasi SIMANJA harus memiliki kriteria dan kompetensi yang bisa menunjang keberhasilan dari penerapan aplikasi SIMANJA. Namun walaupun demikian tim pengelola ini sangat terbantu dengan tim yang memiliki basic dibidang sistem informasi untuk menunjang keberhasilan penerapan aplikasi SIMANJA. Selanjutnya, dari segi sarana dan prasarana aplikasi SIMANJA ini sudah memadai dan kedepannya akan dikembangkan lagi untuk fitur yang lebih lengkap yang akan dikolaborasikan dengan bidang lain seperti penyusunan neraca serta penatausahaan keuangan yang mana hal-hal tersebut membutuhkan dukungan penuh dari para tim pengelola.

Selain itu, dalam proses pelaksanaannya terkadang aplikasi ini terkendala dengan regulasi dari pusat yang sering berganti sehingga membuat aplikasi ini tidak dapat ditetapkan untuk jangka panjang. Pada hasil wawancara oleh Pak Heru selaku Koordinator dari aplikasi SIMANJA mengatakan sejak aplikasi ini dikeluarkan pada tahun 2018 lalu selang setahun di tahun 2019 terjadi penyesuaian kembali dengan regulasi yang baru. Hal tersebut menjadi

kendala yang didapati sampai saat ini sehingga sulit untuk membuat aplikasi dengan jangka panjang.

Meskipun aplikasi ini masih terkendala oleh beberapa hal, tapi rupanya aplikasi SIMANJA ini memiliki besar manfaat yang dihasilkan. Pak Heru mengatakan banyak sekali manfaat yang didapatkan jika kita bandingkan dengan waktu belum ada aplikasi, manfaat yang didapat adalah pemerintah mempunyai data aset yang memadai serta dapat memperoleh informasi yang valid terkait dengan barang-barang yang dikelola. Selain itu, dalam penyusunan neraca daerah menjadi lebih cepat terlebih karena di aplikasi ini terdapat perhitungan penyusutan barang sehingga tidak perlu perhitungan manual satu persatu seperti dulu.

Pak Heru Koordinator aplikasi SIMANJA mengatakan secara garis besar aplikasi ini sudah berjalan sesuai rencana bahkan menurutnya melebihi ekspektasinya. Namun, aplikasi ini belum dapat dipublikasikan ke masyarakat luas karena terhambat oleh regulasi yang ada. Jadi, *e-Government* disini lebih ke arah tipe *government to government* yang mana dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah untuk membantu memudahkan kegiatan birokrasi salah satunya pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menjadi lebih efektif dan efisien, namun masyarakat pun turut mengambil manfaatnya seperti menerima data matang yang dipublikasikan oleh pemerintah khususnya BPKAD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jepara. Harapan untuk aplikasi SIMANJA ini lebih dipertahankan kembali jangan sampai menurun intensitasnya dan turut selalu mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.

KESIMPULAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jepara. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan pemerintahan juga harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan yang merupakan bentuk dukungan terhadap penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara khususnya pada BPKAD Kabupaten Jepara mengeluarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Jepara (SIMANJA).

SIMANJA merupakan aplikasi yang dibangun untuk penatausahaan aset daerah dalam rangka memudahkan pencatatan serta pendataan aset-aset milik daerah Kabupaten Jepara. Aplikasi SIMANJA diharapkan dapat menghasilkan informasi yang relevan dan andal, untuk menjawab permasalahan yang ada di BPKAD Kabupaten Jepara mengenai penatausahaan aset milik daerah. Namun, dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan seperti kesiapan SDM para pengelola yang belum sesuai dengan keahliannya, jumlah anggaran yang belum memadai dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan APBD, selanjutnya dampak dari kurangnya anggaran ini juga berpengaruh terhadap sosialisasi mengenai aplikasi SIMANJA tidak maksimal karena dalam proses sosialisasi juga memerlukan biaya.

Meskipun tidak ditunjang dengan SDM dan anggaran yang memadai dari awal kehadiran aplikasi SIMANJA pada tahun 2018 hingga saat ini sudah cukup optimal berkat kerja keras dan kreativitas para pengelola aplikasi SIMANJA karena dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel. Adapun kelebihan dari aplikasi ini yaitu data tersusun secara sistematis serta secara detail karena ditunjang dengan fitur gambar dalam aplikasinya. Yang mana fitur gambar ini digunakan untuk mengupload barang milik daerah yang dikeluarkan. Dengan begitu hal tersebut dapat meminimalisir kecurangan yang mengarah pada tindakan korupsi.

Referensi

- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998>
- Helmi, H., Muzwardi, A., & Hasan, E. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 98–111. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2524>
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nahar, A., & Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82-97.
- Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Risnandar. (2014). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 2, 192–199.
- Setiawati, Wenny. 2007. Penerapan E-Government Di Indonesia. Melalui http://komunikasipublik.multyply.com/journal/item/120/Penerapan_e-government_di_Indonesia [20/06/2013].
- Sutrisno. H 2023. “Penerapan E-Government”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 November 2023, BPKAD Kabupaten Jepara.
- Suwanda, D., Retnowati, & Esvandiari. (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. PPM Manajemen.
- Tukunang, S. C. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah